

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Daim, Nuryanto. (2014). Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Ali, Achmad. (2015). Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Amsary, Feri. Perubahan UUD 1945, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- A. Roihan, Rasyid. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Assidiqie, Jumly dan Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Bagja, Rachmat dan Dayanto. (2019). Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan. Depok: Raja Grafindo.
- Budihardjo, Miriam. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Campbel Black, Henry. (2010). Black Law Dictionary, West Publishing.
- Daliyo, B., dkk. (1996). Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Jonaedi. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di Masyarakat. Jakarta : Prenada Media.
- Encyclopedia Britanica
- Harahap, Yahya. M. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (2008). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidjaz, Kamal. (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indoensia. Makasar : Pustaka Refleksi.
- HR, Ridwan. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Banyumedia Publishing.

Ilmar, Aminuddin. (2014). Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta : Prenadamedia Group.

Johan Utama, Yos. (2009). Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip. Semarang : Badan Penerbit Undip.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi 1.0.0 (100), edisi Oktober 2023, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kelsen, Hans. (1992). *Introducing to the Problem of Legal Theory : a Translation of The First Edition of The Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law*. United Kingdom: Oxford University Press.

L. Bernard, Tanya, dkk. (2010). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Mahfud, MD. (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*. Jakarta: Rajawali Press.

Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.

_____. (2015). *Penelitian Hukum – edisi revisi*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

_____. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UAJY Press.

_____. (2009) *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

McLeod Ian, 2013, *Legal Method*, ninth edition, Palgrave Macmillan Law Masters, New Hampshire.

M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

_____. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Nur Rasaid, M. (2003). *Hukum Acara Perdata cetakan Ketiga*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Schubert, Glendon. (1998). *Judicial Behaviour: A Reader in Theory and Research*. Chicago: Rand McNally.

S.F., Marbun. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII.

Simanjuntak, Enrico. (2018). *Perdebatan Hukum Administrasi*. Bekasi.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Syahrani, Riduan. (1998). *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum cetakan I*. Jakarta : Pustaka Kartini.

Pramadya Puspa, Yan. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.

Raharjo, Satjipto. (2005). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (2002). *Indonesia Ingin Penegakan Hukum Progresif*. (artikel dalam Kompas tanggal 15 Juli 2002).

_____. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rasjidi, Lili dan Ib Wyasa Putra. (2003). *Hukum Sebagai Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rhiti, Hyronimus, 2023, *Kepastian Hukum Pengantar Teoretis dan Filosofis*, Cetakan I, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Usman, Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

W. Riawan, Tjandra. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*. Yogyakarta: UII Press.

_____. (2011). *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: UAJY.

W. Kusumah, Mulyana dan Paul S. Baut. (1998). *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Jurnal/Makalah/Disertasi :

Ahmad Rizqi Robbani Kaban, Kekuatan Mengikat Putusan Adjudikasi Bawaslu dalam Sengketa Proses Pemilu 2019, Jurnal Hukum Adigama.

Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar. Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono, Jurnal Yuridika, Volume 29 No. 1, Januari- April 2014, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Beniharmoni Harefa. 2016. Jurnal Komunikasi Hukum: Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum. Jilid 2 Nomor 1.

FC Susila Adiyanta, Hukum dan Proses Pengambilan Putusan oleh Hakim : menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi (Theories of Adjudication), Administrative Law & Governance Journal, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021.

Heather Leawoods, Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher, Washington University Journal of Law & Policy, vol 2, Januari 2000.

Herwyn Jefler Hielsa Malonda. Adjudikasi Dalam Perspektif Teori, Jurnal Equilibrium, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, Hal. 11-33.

H. Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dejure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 2, September 2016.

Irwan Yulianto, Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XV, Nomor 2, November 2017.

Jonatan Hamonangan Siahaan, Tinjauan Yuridis Judex Non Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Lex et Societatis, Volume II, Nomor 4, Mei 2014.

Mario Julyano, AY Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Crepido Volume 1, hlm. 13-22. Juli 2019.

Martitah, Disertasi Model Fungsionalisasi Jaringan Sosial sebagai Bagian Sosial Capital dalam Pelaksanaan Putusan MK yang Bersifat Positive Legislature. Program Pasca Sarjana FH Undip.

Muslimah Hayati, Analisis Yuridis Pro dan Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Ultra Petita, Jurnal Wasaka Hukum Vol. 7 Nomor 1, Feburari 2019.

Muzahhirin, Chrisdianto Eko Purnomo, Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Sistem Peradilan Administrasi Pemilihan Umum, Jurnal Melayunesia Law, Volume 2 Nomor 2, Desember 2018.

Noviani Putri Ramadhani, Praktik Ultra Petita dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Lex Privatum Vol 13 No. 5 Tahun 2024.

Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998.

Rosalia Dewi Kusumaningrum, Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta edisi V/2024 Tahun 2017.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol.1/April 2005.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) – tidak berlaku

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 419)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 56/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman dengan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor

62/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sleman Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Putusan:

Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor Register Permohonan 01/PS/BWSL.SLM.15.05/VIII/2018

Internet :

David A. Strauss, *The Living Constitution* dikutip pada laman <https://www.law.uchicago.edu/news/living-constitution> pada tanggal 12 Juni 2025.

Elisabeth Putri Hapsari, Lapon Tukan leonard dan Ayu Putriyanti <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dir/> . Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5K/TUN/1992. Di Akses Pada Tanggal 24 Mei 2021. Pukul. 19.45 WIB.

Mahfud MD dan Benjamin Mangkoedilaga. Mendudukan Soal Ultra Petita. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>. Diakses pada 14 Agustus 2022.

Mahfud MD, Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4719>. Diakses 18 Agustus 2022.

Mahfud MD, “Mendudukan Soal Ultra Petita”, dikutip pada laman: <http://www.kompas.com/kompascetak/0702/05/opini/3289700.htm>, diakses pada 30 Maret 2023.

Pan Mohamad Faiz, Putusan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi, <https://panmohamadfaiz.com/2021/03/04/putusan-ultra-petita-di-mahkamah-konstitusi/>. Diakses 02 Februari 2025.